



Dampak Pemberdayaan Perempuan dan Penggunaan Anggaran Desa terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Tanjung Garbus I

Shaliza Yustifa^{1*}, Simon Patar Rizki², Daniel Ebenezer Silaban³

¹⁻³Ekonomi Pembangunan, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Indonesia

Email: shalizayustifa3@gmail.com¹, simonpatarrizkymanalu@utnd.ac.id², daniel@utnd.ac.id³

*Penulis Korespondensi: shalizayustifa3@gmail.com

Abstract. Women's empowerment is an important aspect of village development because it contributes to improving the quality of human resources and community welfare. The success of empowerment programs is closely related to the allocation and utilization of Village Funds as a source of financing for community development. This study aims to analyze the allocation of Village Funds, their impact on women's empowerment, their contribution to human resource development, and the implementation of empowerment programs in Tanjung Garbus I Village. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials, women's groups, and related stakeholders. The data were analyzed using the interactive model of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Village Funds have been allocated in accordance with applicable regulations and have supported various women's empowerment programs, including skills training, PKK activities, and community economic development. These programs have contributed to improving women's knowledge, skills, self-confidence, and economic participation. However, the implementation still faces challenges, particularly limited budget allocation for women's empowerment and the absence of sustainable post-training assistance. The study implies that optimizing Village Fund allocation and strengthening mentoring programs are necessary to enhance the sustainability and effectiveness of women's empowerment and human resource development at the village level.

Keywords: Human Resources; Village Development; Village Fund; Women's Empowerment; Women's Participation.

Abstrak. Aspek penting dalam membangun desa adalah dengan pemberdayaan perempuan dikarenakan Berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program pemberdayaan tidak terlepas dari alokasi dan penggunaan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi Dana Desa, dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan, kontribusinya terhadap pembangunan sumber daya manusia, serta implementasi program pemberdayaan di Desa Tanjung Garbus I. Metode kualitatif deskriptif diterapkan dalam riset ini, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi serta wawancara bersama kelompok perempuan, pemerintah dsar serta pihak terkait. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Ditemukan Dana Desa telah dialokasikan sesuai ketentuan dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan PKK, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Program tersebut berkontribusi positif pada meningkatnya pengetahuan, kepercayaan diri serta keterampilan dan partisipasi ekonomi Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa terbatasnya alokasi anggaran khusus pemberdayaan perempuan dan belum optimalnya pendampingan pascapelatihan. Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan Dana Desa dan penguatan pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan perempuan dan pembangunan sumber daya manusia di tingkat desa.

Kata Kunci: Dana Desa; Partisipasi Perempuan; Pembangunan Desa; Pemberdayaan Perempuan; Sumber Daya Manusia.

1. LATAR BELAKANG

Komponen krusial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan adanya sumber daya manusia. Faktor yang ikut serta menentukan keberhasilan pembangunan tersebut adalah keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama bidang sosial dan ekonomi. *World Bank* (2022) menjelaskan bahwa negara dengan tingkat partisipasi

perempuan yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Namun demikian, partisipasi perempuan di Indonesia masih relatif rendah. Data Badan Pusat Statistik (2022) ditemukan bahwa keaktifan tenaga kerja wanita yaitu 55,4%, lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang mencapai sekitar 65%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional, terutama di wilayah pedesaan. Menurut Duflo (2012), pemberian akses yang setara kepada perempuan dalam pendidikan dan kegiatan ekonomi mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Sementara itu, Moser (2021) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekedar terkait dari peningkatan pendapatan, namun disertai kompetensi perempuan untuk mengambil keputusan, mengakses sumber daya, serta berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas SDM di tingkat desa.

Permasalahan tersebut juga terlihat di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022–2024, nilai IPG meningkat dari 91,61 pada tahun 2022 menjadi 92,15 pada tahun 2024, tetapi masih berada di bawah Kabupaten Karo yang telah mencapai 96,49. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Deli Serdang masih berfluktuasi, yaitu sebesar 50,36% pada tahun 2021, turun menjadi 48,61% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 53,21% pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah belum optimal sehingga diperlukan upaya pemberdayaan yang lebih efektif.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Tanjung Garbus I. Berdasarkan hasil observasi dan data primer penelitian, dari 2.059 penduduk perempuan hanya terdapat 30 orang yang pernah mengikuti program pemberdayaan selama periode 2018–2024 atau sekitar 1,46% dari jumlah perempuan di desa tersebut. Program yang telah dilaksanakan meliputi pelatihan menjahit, pembuatan kue, kerajinan akrilik, peternakan, hidroponik, salon, hingga pelatihan bahasa Jepang. Namun, hasil wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa partisipasi perempuan belum berlangsung secara berkelanjutan karena masih dipengaruhi oleh kesibukan rumah tangga, rendahnya motivasi, dan kurangnya pendampingan setelah pelatihan.

Selain pemberdayaan perempuan, penggunaan anggaran dana desa juga menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan SDM. Berdasarkan Database Keuangan Desa Tanjung Garbus I Tahun 2023, anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp277.805.800, sedangkan anggaran bidang pelaksanaan pembangunan mencapai Rp518.069.431. Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun

2024 alokasi untuk bidang pemberdayaan masyarakat hanya sekitar 14,6% dari total pendapatan desa, sedangkan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan hanya sekitar 2%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengembangan kapasitas perempuan masih relatif terbatas dibandingkan dengan pembangunan fisik desa.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Id & Tohari, (2023) yang menunjukkan bahwa Program Dana Desa di Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga pedesaan, khususnya pada rumah tangga pertanian. Selain itu, implementasi Dana Desa juga meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di wilayah pedesaan sekitar 10 poin persentase serta mendorong pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor jasa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya berperan dalam pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung pemberdayaan perempuan dan pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memberikan dampak positif terhadap pembangunan masyarakat. Sari & Widodo (2018) menemukan bahwa program pemberdayaan perempuan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi sekaligus memperkuat modal sosial masyarakat. Selanjutnya, Hartono, (2025) menyatakan bahwa investasi pada pemberdayaan perempuan menghasilkan dampak berantai terhadap pembangunan desa. Penelitian Nugroho dan Larasati, (2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan dipengaruhi oleh dukungan anggaran desa yang memadai dan pendampingan yang berkelanjutan. Sementara itu, Maelana et al., (2023) membuktikan bahwa sinergi antara program pemberdayaan perempuan dan penggunaan dana desa yang tepat sasaran mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di tingkat desa. Novilasari et al., (2024) juga menyatakan P2WKSS di Kecamatan Kebon Pedas ditemukan dampak yang baik ketika pelaksanaan program pemberdayaar perempuan dan perkembangan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al.,(2025) juga menunjukkan bahwa peran aktif aparaturnya desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di desa wisata Kabupaten Serdang Bedagai. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh peran pemerintah desa dalam mengelola dan mengarahkan pelaksanaan program pembangunan

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas pemberdayaan perempuan atau penggunaan dana desa secara terpisah. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara bersamaan bagaimana pemberdayaan perempuan dan penggunaan anggaran dana desa memberikan dampak terhadap pembangunan sumber daya manusia pada tingkat desa dengan menggunakan kondisi empiris yang terjadi di Desa Tanjung Garbus I. Selain itu, penelitian ini didukung oleh data primer hasil observasi, wawancara, angket masyarakat, serta data pengelolaan dana desa sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara program pemberdayaan, pengalokasian anggaran desa, dan pembangunan SDM.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada beberapa permasalahan, yaitu bagaimana alokasi Dana Desa diterapkan di Desa Tanjung Garbus I, bagaimana dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan, bagaimana pembangunan sumber daya manusia berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan, serta bagaimana pelaksanaan program pembangunan manusia dan pemberdayaan perempuan di desa tersebut. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan fokus dan tujuan penelitian

Mengacu pada permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi Dana Desa, mengkaji dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan, menjelaskan kontribusi pembangunan sumber daya manusia terhadap pemberdayaan perempuan, serta mendeskripsikan pelaksanaan program pembangunan manusia dan pemberdayaan perempuan di Desa Tanjung Garbus I. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pembangunan desa dan pemberdayaan perempuan serta menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan penggunaan Dana Desa yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai langkah mendorong kekuatan atau kompetensi baik kelompok ataupun individu (Trisnawati, 2017). Konsep penting dalam pembangunan adalah dengan memberdayakan perempuan, yang bermaksud untuk meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses sumber daya serta ikut serta ketika mengambil keputusan dan memperbaiki kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Konsep ini menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Menurut Basiroen et al. (2024) pemberdayaan perempuan merupakan proses perubahan yang memungkinkan perempuan memperoleh

sumber daya (*resources*), kemampuan bertindak (*agency*), dan hasil nyata (*achievement*) sehingga mampu menentukan pilihan hidup secara mandiri. Pemberdayaan perempuan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga pada perluasan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, modal usaha, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Upaya tersebut bertujuan menciptakan kesetaraan gender sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu strategi penting dalam pembangunan yang berpusat pada manusia karena mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan

Pandangan tersebut didukung oleh Awinpoka et al., (2023) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan perlu dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pemberdayaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas perempuan, memperluas akses terhadap sumber daya, serta meningkatkan kemampuan perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan program pemberdayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Moser (2021) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan saja berfokus untuk menambah penghasilan namun diarahkan untuk mengurangi ketimpangan gender melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemilikan sumber daya, serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari upaya menghilangkan hambatan struktural yang selama ini membatasi perempuan dalam memperoleh kesempatan yang setara. Dalam penelitian ditemukan Ramadhani et al., (2023) bahwa Perempuan desa bukan lagi hanya penonton dalam proses pembangunan, tetapi mereka telah menjadi bagian yang berperan aktif dalam merumuskan dan mengawal perencanaan pembangunan desa

Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan perempuan dalam memperoleh pendidikan, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, mengambil keputusan dalam keluarga, memiliki akses terhadap sumber daya, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. (Suharto, 2017) menyatakan bahwa indikator pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan akses pendidikan, kesempatan kerja, keterwakilan dalam lembaga publik, serta peningkatan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, Mulyana & Hasanah (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan juga

ditunjukkan oleh meningkatnya kemandirian perempuan dalam mobilitas, pengambilan keputusan, aktivitas ekonomi, serta kesadaran terhadap hak-hak sosial dan politik.

Penggunaan Anggaran Dana Desa

Penggunaan anggaran dana desa adalah bagian dari program pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa dengan meningkatkan layanan pada publik, pemberdayaan masyarakat serta infrastruktur, serta pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa merupakan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran. Pengelolaan yang baik akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat program pemberdayaan masyarakat sehingga pemanfaatan Dana Desa dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Hasil penelitian Usman et al., (2024) menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan perempuan telah dianggarkan dan direalisasikan melalui berbagai program, seperti peningkatan keterampilan dan kapasitas perempuan di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektivitas, dan efisiensi. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa tata kelola anggaran yang baik merupakan syarat utama agar penggunaan anggaran mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran, sedangkan akuntabilitas memastikan setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, pengelolaan dana desa mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Harjono, (2014), yaitu pengalokasian sumber daya dan efisiensi serta efektivitas operasional kegiatan. Pengalokasian sumber daya menunjukkan bahwa dana desa harus didistribusikan secara adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa memprioritaskan kelompok tertentu. Sementara itu, efisiensi dan efektivitas operasional kegiatan menekankan bahwa penggunaan dana desa harus mampu mencapai tujuan program secara optimal, memanfaatkan sumber daya secara tepat, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan proses meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Hasibuan, (2019) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama pembangunan karena menjadi faktor yang menentukan keberhasilan suatu organisasi maupun daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Todaro & Smith (2021) pembangunan sumber daya manusia tidak sekedar berpatokan pada penambahan penghasilan masyarakat, melainkan dari meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi maupun sosial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Moser, (2021) menjelaskan bahwa perempuan perlu memperoleh akses dan kesempatan yang setara agar mampu berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Dalam pembangunan desa, perempuan memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan. Basiroen et al., (2024) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan perempuan karena perempuan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, serta pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, membangun sumber daya manusia yang baik memerlukan strategi dari pemberdayaan perempuan serta penggunaan anggaran dana desa yang efektif. Pembangunan sumber daya manusia tidak hanya diarahkan pada peningkatan tingkat pendidikan, tetapi juga peningkatan keterampilan, produktivitas, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. Dalam konteks pembangunan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting karena masyarakat yang memiliki kompetensi akan lebih mampu berpartisipasi dalam pembangunan, mengembangkan usaha produktif, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pemberdayaan perempuan, pengelolaan Dana Desa, dan pembangunan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menjadi landasan dalam menjelaskan keterkaitan antarvariabel yang digunakan pada penelitian ini. Bustami, (2016) menemukan bahwa transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Ditemukan bahwa tata kelola anggaran yang baik mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Penelitian Novilasari et al., (2024)

mengenai pemberdayaan perempuan pada kelompok P2WKSS menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan dan pengembangan usaha mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada pengembangan UMKM sehingga belum mengkaji secara langsung keterkaitan antara penggunaan anggaran dana desa, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan sumber daya manusia.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pemberdayaan perempuan dan penggunaan anggaran dana desa merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Pemberdayaan perempuan dilakukan melalui peningkatan kapasitas, keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Menurut Moser, (2021) pemberdayaan perempuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Basiroen et al., (2024) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan akan berjalan optimal apabila didukung oleh kebijakan dan sumber daya yang memadai, termasuk melalui pemanfaatan dana desa.

Penggunaan anggaran dana desa dipandang sebagai instrumen kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas SDM melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang dialokasikan secara tepat pada bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan perempuan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Sebaliknya, apabila penggunaan dana desa lebih berorientasi pada pembangunan fisik dan belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pengembangan kapasitas masyarakat, maka dampaknya terhadap peningkatan kualitas SDM menjadi kurang optimal. Mardiasmo, (2016) menegaskan bahwa efektivitas penggunaan anggaran sangat ditentukan oleh ketepatan prioritas program, sedangkan Todaro & Smith, (2021) menyatakan bahwa investasi pada pembangunan manusia menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini memandang bahwa keberhasilan pembangunan SDM di Desa Tanjung Garbus I bukan saja berdampak dari besarnya anggaran dana desa, namun disertai efektivitas pengalokasian anggaran dalam mendukung program pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan berperan sebagai bentuk implementasi program pembangunan masyarakat, sedangkan penggunaan anggaran dana desa menjadi faktor pendukung yang menentukan keberhasilan

pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, pemberdayaan perempuan, pengelolaan Dana Desa, dan pembangunan sumber daya manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara efektif akan mendukung pelaksanaan berbagai program pemberdayaan perempuan melalui penyediaan anggaran yang memadai. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, kapasitas, dan kemandirian perempuan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Tanjung Garbus I. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis dampak pemberdayaan perempuan dan penggunaan anggaran dana desa terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Desa Tanjung Garbus I, Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan digunakan dikarenakan dapat mendeskripsikan fenomena dengan mendalam sesuai kondisi yang sebenarnya melalui pengumpulan data dari berbagai sumber (Sugiyono, 2022). Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjung Garbus I, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan waktu penelitian selama tiga bulan.

Subjek dipilih secara purposive sampling yaitu disesuaikan dengan ketentuan yang dimana adalah individu yang paham permasalahan yang diteliti. Informan terdiri atas Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemberdayaan, Ketua TP PKK, perempuan yang mengikuti program pemberdayaan, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Desa Tanjung Garbus I. Data yang digunakan yaitunya, pertama data sekunder didapatkan dari dokumen yaitunya profil desa, laporan realisasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Dan data primer yang didapatkan dari observasi langsung serta wawancara mengenai pelaksanaan program pemberdayaan perempuan serta penggunaan anggaran dana desa.

Data dikumpulkan dengan dokumentasi, wawancara serta observasi. Wawancara diterapkan dengan semi terstruktur, dokumentasi digunakan untuk melengkapi temuan obeservasi serta wawancara, dan observasi dengan maksud mendapatkan gambaran terkait kondisi masyarakat serta pelaksanaan program di lapangan (Sugiyono, 2022).

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2023). Model penelitian dalam penelitian ini menggambarkan bahwa pemberdayaan perempuan dan penggunaan anggaran dana desa merupakan fokus utama yang dianalisis untuk mengetahui dampaknya terhadap pembangunan sumber daya manusia di Desa Tanjung Garbus I. Model tersebut menjadi dasar dalam menginterpretasikan hubungan antara pelaksanaan program pemberdayaan, pengelolaan dana desa, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil diperoleh dari proses observasi, wawancara serta studi dokumentasi, dan penyebaran angket kepada peserta program pemberdayaan perempuan di Desa Tanjung Garbus I, Kabupaten Deli Serdang. Pengumpulan data dilaksanakan selama tiga bulan dengan melibatkan perangkat desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemberdayaan, kader PKK, dan masyarakat sebagai informan utama. Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan teknik Miles dan Huberman.

Alokasi dan Penggunaan Dana Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Perempuan

Temuan menjelaskan jika pengelolaan anggaran di Desa Tanjung Garbus I sudah mengikuti mekanisme sesuai ketentuan pemerintah melalui transfer berasal dari pemerintah untuk rekening kas desa. Pada tahun 2025 desa menerima Dana Desa sebesar Rp800.000.000 yang dialokasikan ke berbagai bidang pembangunan sesuai hasil musyawarah desa. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kaur Keuangan yang menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran dilakukan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa sehingga alokasi Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut informan, *"proses penyusunan anggaran desa dimulai dari musyawarah dusun, kemudian dibahas kembali dalam musyawarah desa bersama perangkat desa dan perwakilan masyarakat."*

Salah satu prioritas penggunaan anggaran diarahkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PKK, pelatihan keterampilan, serta dukungan terhadap UMKM. Pengalokasian dana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya mendistribusikan anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan teori pengelolaan Dana Desa yang dikemukakan Harjono, (2014) menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan melalui pengalokasian sumber daya secara proporsional sehingga mampu memenuhi kepentingan

masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan dana untuk berbagai program pelatihan juga menunjukkan adanya upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Walaupun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa alokasi khusus untuk pemberdayaan perempuan masih relatif kecil, yaitu sekitar 2% dari keseluruhan Dana Desa. Hal ini mengindikasikan perhatian terhadap pengembangan kapasitas perempuan telah ada, namun proporsi anggarannya masih dapat ditingkatkan agar manfaat program menjadi lebih optimal.

Transparansi Penggunaan Dana Desa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tanjung Garbus I menerapkan prinsip keterbukaan melalui publikasi penggunaan anggaran pada spanduk informasi di kantor desa serta melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah dan pengawasan penggunaan dana. Kaur Keuangan menjelaskan bahwa *"masyarakat dilibatkan dalam penggunaan anggaran khususnya dari perwakilan PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat sehingga penggunaan Dana Desa dapat diawasi bersama."* Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut Harjono, (2014), pengelolaan Dana Desa yang baik tidak hanya berorientasi pada penggunaan anggaran, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang terbuka. Keterlibatan PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat dalam proses pengawasan juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga keputusan penggunaan anggaran menjadi lebih partisipatif.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa secara rutin melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan pembuatan kue, menjahit, salon, hidroponik, bahasa Jepang, kerajinan, serta pembinaan PKK. Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, memperluas peluang usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Pemberdayaan, setiap pelatihan dilaksanakan dengan menghadirkan mentor sesuai bidang keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Informan menyampaikan bahwa *"desa langsung mengundang mentor sesuai kebutuhan program sehingga materi pelatihan lebih sesuai dengan jenis usaha yang ingin dikembangkan peserta."*

Temuan menegaskan pemberdayaan perempuan bukan hanya dipahami untuk pemberian bantuan, melainkan merupakan proses peningkatan kapasitas individu. Sejalan dengan pandangan Basiroen et al., (2024) dimana pemberdayaan perempuan merupakan proses

meningkatkan kemampuan (*agency*) sehingga perempuan mampu mengambil keputusan, mengembangkan potensi diri, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa seluruh responden pernah mengikuti program pemberdayaan, yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Tingginya partisipasi tersebut menjadi indikator bahwa program yang dilaksanakan pemerintah desa telah diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dampak terhadap Kapasitas Perempuan

Program pemberdayaan berdampak positif pada meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan ekonomi serta keterampilan perempuan. Sebanyak 57% responden menyatakan mampu melanjutkan usaha setelah mengikuti pelatihan, sedangkan responden lainnya mengaku memperoleh pengetahuan baru dan lebih percaya diri dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun sosial. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga kemampuan peserta dalam menerapkan keterampilan yang diperoleh. Kaur Pemberdayaan menjelaskan bahwa *"indikator keberhasilan biasanya dilihat dari kemampuan peserta membuka usaha kecil atau memiliki keterampilan baru yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari."*

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa program pemberdayaan telah berhasil mendorong sumber daya manusia perempuan yang berkualitas di desa. Menurut Basiroen et al., (2024) keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan individu dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, memperoleh kesempatan ekonomi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti peserta yang tidak menyelesaikan pelatihan, keterbatasan pendampingan pascapelatihan, serta masih rendahnya modal usaha. Kondisi tersebut menyebabkan hasil program belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan strategi pendampingan yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Maelana et al., (2023) Maelana et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa yang diarahkan pada program pemberdayaan perempuan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di tingkat desa. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya anggaran, tetapi juga oleh keberlanjutan pendampingan setelah pelatihan sehingga keterampilan yang diperoleh peserta dapat terus dikembangkan.

Peran Dana Desa terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kontribusi Dana Desa terhadap Pengembangan SDM

Ditemukan jika Dana Desa tidak bukan sekedar untuk pembangunan fisik, melainkan mendorong pembangunan sumber daya manusia dengan berbagai kegiatan pendidikan, pembinaan PKK, Posyandu, pelatihan keterampilan dan pengembangan UMKM. Artinya Dana Desa telah dimanfaatkan untuk instrumen pembangunan manusia.

Temuan tersebut didukung hasil wawancara yang menunjukkan bahwa Dana Desa dimanfaatkan untuk berbagai program seperti pelatihan keterampilan, pembinaan PKK, Posyandu, dan pengembangan UMKM sehingga tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penggunaan anggaran tersebut sejalan dengan konsep pengelolaan Dana Desa menurut Harjono, (2014) yang menekankan bahwa penggunaan anggaran harus dilaksanakan dengan efisiensi serta efektif supaya bisa memperoleh tujuan pembangunan desa. Melalui pelaksanaan berbagai pelatihan, perempuan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi yang kemudian berdampak terhadap peningkatan produktivitas keluarga dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan SDM dan pemberdayaan perempuan memiliki hubungan yang saling mendukung.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Id & Tohari, (2023) yang menjelaskan bahwa implementasi Dana Desa berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi kerja perempuan di wilayah pedesaan. Pada penelitian ini, kontribusi tersebut tercermin melalui pelaksanaan berbagai pelatihan keterampilan dan pengembangan UMKM yang memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas ekonomi.

Implementasi Program dan Faktor Pendukung

Pelaksanaan program dilakukan melalui musyawarah desa, Kaur Keuangan menjelaskan bahwa *"evaluasi dilakukan secara rutin bersama pemerintah desa, lembaga pengawas, dan masyarakat sehingga dapat diketahui apakah program berjalan efektif atau masih memerlukan perbaikan."* Dan ditemukan perekrutan peserta oleh kepala dusun, pelaksanaan pelatihan bersama mentor, serta evaluasi berkala oleh pemerintah desa. Faktor pendukung utama keberhasilan program meliputi dukungan pemerintah desa, partisipasi kader PKK, keterlibatan masyarakat, serta pelaksanaan program tanpa biaya bagi peserta. Sebaliknya, hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya motivasi sebagian peserta, kesibukan rumah tangga, keterbatasan modal usaha, serta belum adanya pendampingan secara berkelanjutan setelah pelatihan selesai. Temuan membuktikan keberhasilan pemberdayaan perempuan yang bukan

saja dari besarnya anggaran, melainkan juga dari kualitas pelaksanaan program serta keberlanjutan pendampingan kepada peserta.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat teori Harjono, (2014) bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel mampu mendukung pembangunan masyarakat. Temuan penelitian juga sejalan dengan teori Basiroen et al., (2024) yang menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan proses peningkatan kapasitas individu sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan partisipasi sosial. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan arah kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pelatihan, pembinaan PKK, Posyandu, serta pengembangan UMKM perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Dana Desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga telah mendukung pembangunan berbasis masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, efektivitas program masih belum optimal karena alokasi anggaran pemberdayaan perempuan relatif terbatas serta belum didukung pendampingan pascapelatihan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan proporsi anggaran, pendampingan usaha, dan akses permodalan diperlukan agar manfaat program dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Garbus I telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa serta program pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa melalui berbagai pelatihan keterampilan, kegiatan PKK, pendidikan, dan layanan kesehatan terbukti memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan perempuan, yang ditunjukkan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, partisipasi sosial, serta peluang ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia di Desa Tanjung Garbus I. Namun, efektivitas program masih perlu ditingkatkan karena alokasi anggaran pemberdayaan perempuan relatif terbatas dan pendampingan pascapelatihan belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah desa disarankan meningkatkan pendampingan dan optimalisasi alokasi Dana Desa bagi program pemberdayaan perempuan agar manfaatnya

lebih berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan *mixed methods* agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan rasa terima kasi untuk Pemerintah Desa Tanjung Garbus I beserta seluruh informan yang telah memberikan izin, data, serta informasi ketika proses pengambilan data berlangsung dan terima kasih kepada dosen pembimbing yang sudah memberikan masukan serta arahan sehingga penuli dapat menyusun naskah ini dengan baik, serta untuk keseluruhan pihak yang sudan mendukung baik secara tidak langsung ataupun langsung.

DAFTAR REFERENSI

- Awinpoka, C., Nyuur, R. B., & Dery, I. (2023). World Development Sustainability Non-Governmental Organizations ' Approaches To Women ' S Empowerment Amid The Covid-19 Pandemic : Towards Decolonizing Development Praxis In Northern Ghana. *World Development Sustainability*, 3(May), 100079. <https://doi.org/10.1016/J.Wds.2023.100079>
- Bank, W. (2022). *Women Business And The Law 2022*. https://documents.worldbank.org/En/Publication/Documents-Reports/Documentdetail/099062426125125240?Utm_Source=Chatgpt.Com
- Basiroen, V. J., Mahmudah, H., Hidayat, A. A., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Ilma, A. F. N. (2024). *Women Empowerment: Women's Journey To Empowerment*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bustami. (2016). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*.
- Duflo, E. (2012). Women Empowerment And Economic Development. *Journal Of Economic Literature*, 50(4), 1051–1079.
- Harjono. (2014). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Business Review*, 5(2), 537–550.
- Hartono, I. B. (2025). *Dari Luka Lahir Daya, Kisah Inspiratif Dan Model Ketahanan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga Di Kota Depok*. Pt Becreative Media Talenta.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Id, A. R., & Tohari, A. (2023). Rural Poverty And Labour Force Participation : Evidence From Indonesia ' S Village Fund Program. *Plos One*, 1–15. <https://doi.org/10.1371/Journal.Pone.0283041>
- Larasati, C. R. (2024). *Peran Dinas Koperasi Dan Umkm Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Kewirausahaan*.

- Maelana, H. W. D., Wijayanti, I. D. S., Murdapa, P. A., Purwanta, P., & Wahyudiyono, W. (2023). Pelatihan Digital Marketing, Teknik Foto Produk Dan Pengolahan Minyak Jelantah Di Dukuh Srumbung, Kalurahan Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Diy. *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 2(2), 70–88. <https://doi.org/10.56606/Hikmayo.V2i2.143>
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Moser, C. O. N. (2021). *Gender Planning And Development: Theory, Practice And Training*. Routledge.
- Mulyana, N., & Hasanah, D. (2017). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Berencana. *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, 4(1), 1–40. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V4i1.14216>
- Novilasari, T. A., Djati, J. T., Ainun, N., Khoirunissa, & Susanto, P. B. (2024). Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Dan Pengembangan Umkm: Eksplorasi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Di Kelompok P2wkss, Kecamatan Kebon. *Blantika: Multidisciplinary Jorna*, 2(3), 287–292. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V4i1.14216>
- Ramadhani, R. D., Hikmaturokhman, A., Bahtiar, A. R., Alim, N., Nugraha, S., Muna4, B. L., & Raharja, P. A. (2023). Penguatan Kapasitas Peran Aktif Perempuan Melalui Program Wanita Melek Perencanaan Desa (Wani Lemper) Berbasis Teknologi Informasi Di Desa Logede, Kabupaten Kebumen. *Jurnal Hilirisasi Technology Pengabdian Masyarakat Sitechmas*, 4(2), 96–105. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V4i1.14216>
- Sari, I. P., & Widodo, S. (2018). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengembangan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Dan Modal Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 19(2). <https://doi.org/10.31315/Jiks.V19i2.3214>
- Sinaga, E. R., Angin, F. P., & Sinurat, M. (2025). Amkop Management Accounting Review (Amar) The Role Of Village Apparatus , Human Resources , And Women ' S Empowerment In Improving The Living Standards In Tourist Villages Of Serdang Bedagai Regency. *Amkop Management Accounting Review (Amar) Issn*, 5(1), 515–523. <https://doi.org/10.37531/Amar.V5i1.2662>
- Statistik, B. P. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Bps.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Sutopo (Ed.); Edisi Kedu). Alfabeta, Jl. Gegerkalong Hilir No.84 Bandung.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Todaro, & Smith. (2021). *Economic Development (12th)*. Pearson.
- Trisnawati, N. A. (2017). Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 486–500. <https://doi.org/10.26740/Kmkn.V5n02.P%25p>
- Usman, M., Wijhah, & Nurliana. (2024). Analisis Persepsi Gender Terhadap Anggaran Dana

Desa Untuk Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros). *Ijem*, 1(2), 81–86.
<https://doi.org/https://ojs.unpatompo.ac.id/index.php/ijem/id/article/view/315>